

LKj IP
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2019



DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk implementasi dari akuntabilitas pelaksanaan tugas wewenang Pemerintah kota padang Panjang kepada Pemerintah tingkat atas, sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara legalitas formal, penyusunan dan penyampaian LKj IP ini adalah dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana mewajibkan setiap Kepala SKPD untuk menyampaikan kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, maka dalam laporan ini disajikan indikator-indikator yang ditetapkan di dalam penetapan kinerja Dinas Pertanian Kota Padang Panjang, terutama yang menyangkut dengan pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian sebagaimana yang diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian penyusunan LKj IP ini kami sampaikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi maksud dan bermanfaat adanya.

Padang Panjang, Januari 2019
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang



Syاهدانر, SH, MM
Pembina Utama Muda, NIP. 19640815 199003 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini merupakan salah satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari dinas beserta kewenangannya. Berkenaan dengan itu, maka *Program dan Kegiatan* Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mengacu kepada *Renstra Dinas Pangan dan Pertanian* tahun 2013-2018 yang dihimpun menjadi *RKPD* untuk kegiatan Tahun 2018, dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk tahun 2018. Selanjutnya disusunlah Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 yang berisi sasaran dan indikator kinerja serta target yang ingin dicapai pada tahun 2018. Penetapan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 tersebut kemudian dijadikan dasar penyusunan LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.

Penetapan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 berisikan sasaran dan indikator kinerja yang didukung oleh 8 program. Secara kuantitatif, kinerja kegiatan pada Tahun 2018 telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih dari semua pihak yang terkait sehingga Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga apa yang telah di kontribusikan tersebut menjadi amalan bagi kita, Amin.

DAFTAR ISI

Halaman

	KATA PENGANTAR	i
	IKHTISAR EKSKLUSIF	ii
	DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C. Permasalahan Utama (Strategi Issued) yang Dihadapi Organisasi	7
	D. Struktur Organisasi	8
	E. Sumber Daya Manusia	10
	F. Maksud dan Tujuan	11
	G. Sistematika Penyusunan	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Visi Dinas Pangan dan Pertanian	14
	B. Misi Dinas Pangan dan Pertanian	15
	C. Tujuan	15
	D. Sasaran	16
	E. Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	23
	A. Capaian Kinerja Organisasi	23
	B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV	PENUTUP	37
	A. Kesimpulan	37
	B. Saran	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan suatu kewajiban pemerintah termasuk Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini semata-mata tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk menganalisa kelemahan pelaksanaan kegiatan pemerintah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas pemerintah serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Terciptanya pemerintahan yang bersih serta mampu menyediakan “*Public Good and Service*” dengan menerapkan “*Good Governance*” dalam penyelenggaraannya merupakan pra-syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan. Agar menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat), dan supaya efektif diperlukan koordinasi yang baik dan terintegrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Kewajiban tersebut tentunya termasuk bagi pemerintah daerah beserta dengan perangkatnya, tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Berkaitan dengan itu, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagai salah satu perangkat daerah Kota Padang Panjang, juga diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap tahunnya.

Memahami hal tersebut, maka dalam penyusunan LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018 ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman sebagai payung hukumnya antara lain:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/MPAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian.

B. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Kota Padang Panjang kemudian dijabarkan lagi ke dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, telah ditetapkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pangan dan Pertanian adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan, serta Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
2. **Bagian Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan , evaluasi, dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan ;
- b. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan ;
- c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. **Bidang Ketahanan Pangan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan panganekaragaman konsumsi pangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ketersediaan dan keamanan pangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program distribusi dan harga pangan;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

5. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Perikanan ;
- b. Seksi Pelaksana Penyuluhan; dan
- c. Seksi Kelembagaan Tani.

- 6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana, prasarana peternakan dan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesmavet; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Peternakan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner.

7. UPTD Rumah Potong Hewan

UPTD Rumah Potong Hewan dan Pembibitan adalah unsur pelaksana operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana rumah potong hewan; dan

- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan.

UPTD Rumah Potong Hewan susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

UPTD Pusat Kesehatan Hewan susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. UPTD Balai Benih Ikan

UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD BBI pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pembibitan benih ikan, pengujian dan persiapan teknologi di lapangan, pemasaran benih ikan, penyediaan induk unggul dan ikan

konsumsi, pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta Pusat Pelatihan Pembenihan Ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembenihan benih ikan;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
- c. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan;
- d. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi;
- e. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat agrowisata; dan
- f. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

UPTD Balai Benih Ikan susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

C. Permasalahan Utama (Strategic issued) yang dihadapi organisasi

Permasalahan Utama (isu strategis) di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

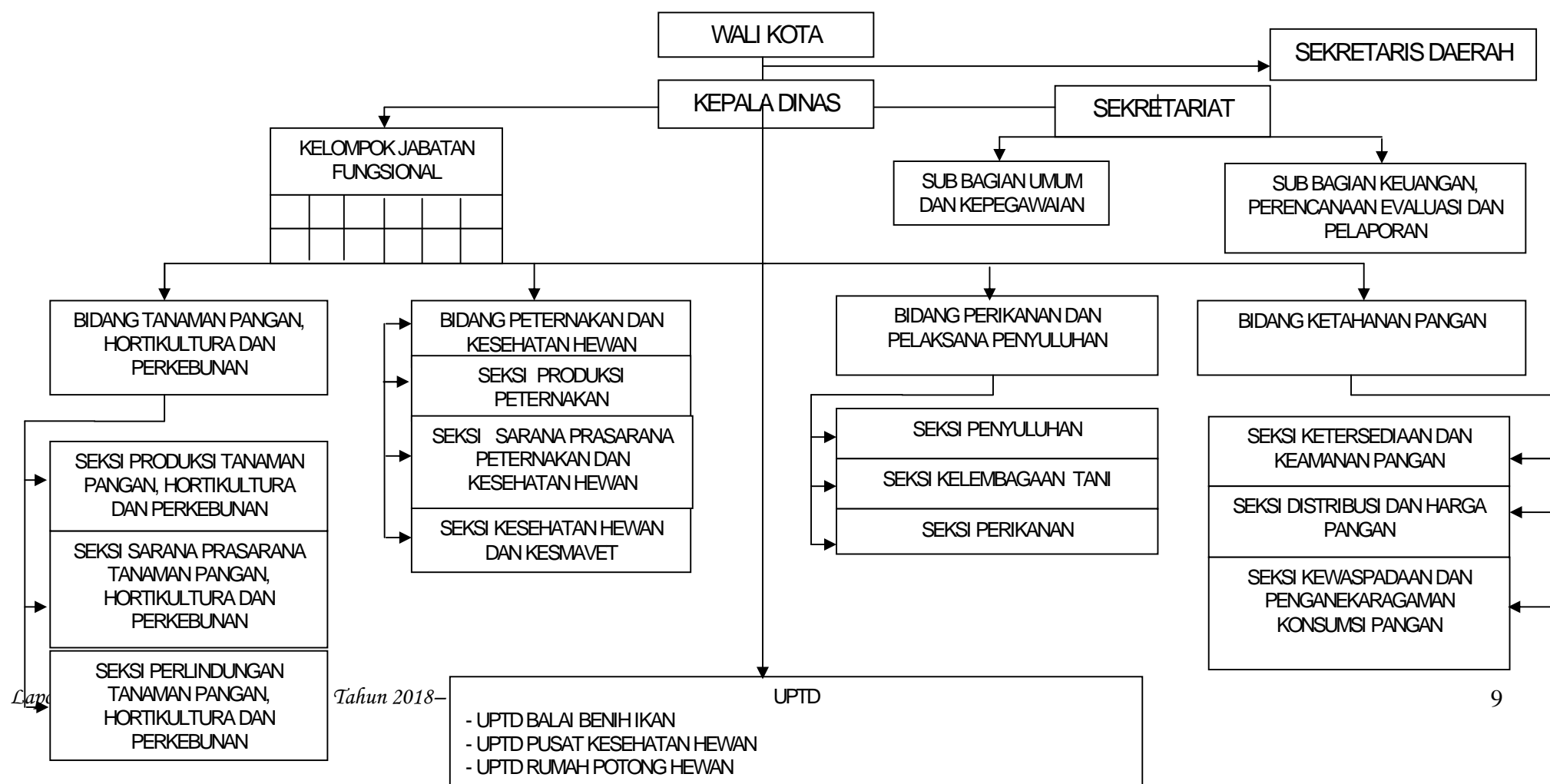
1. Peningkatan produksi, populasi dan produktivitas pertanian;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian;
3. Peningkatan pendapatan petani;
4. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan;

5. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian;
6. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian;
7. Peningkatan minat generasi muda terhadap bidang pertanian;
8. Peningkatan diversifikasi pangan;
9. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani;
10. Peningkatan akses permodalan petani;
11. Alih fungsi lahan; dan
12. Tingginya upah tenaga kerja di bidang pertanian.

D. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG



WALIKOTA PADANG PANJANG	: Fadly Amran, BBA
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG	: Drs. Asrul
KEPALA DINAS	: SYAH DANUR, SH, MM
BAGIAN SEKRETARIAT :	
SEKRETARIS	: Ir. MULYANSRI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	: MUHAMMAD SURYA, SE
SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	: MUHAMMAD SURYA, SE
BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	
KEPALA BIDANG	: FITRIADI M, S.Pt
SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	: RAHMI, S.TP
SEKSI SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	: LIDYA R, SP
SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	: VITRI LIDES, S.TP
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
KEPALA BIDANG	: drh. WAHIDIN BERUH
SEKSI PRODUKSI PETERNAKAN	: FATMA SARI, S.Pt
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN	: SYAFNIATI, S.Pt
SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET	: BUSMAN, S.ST
BIDANG PERIKANAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN :	
KEPALA BIDANG	: INDRA, S.Pi
SEKSI PERIKANAN	: WILHELLIANA DIAN HANDAYANI, S.Pi
SEKSI PENYULUHAN	: RAHMI GUSTINI ARDI, S.Pt
SEKSI KELEMBAGAAN TANI	: JASRIL
BIDANG KETAHANAN PANGAN :	
KEPALA BIDANG	: YOHANA LISA, S.TP, M.Si
SEKSI KETERSEDIAAN DAN KEAMANAN PANGAN	: NAZRUL
SEKSI DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN	: PRISJONI, SP
SEKSI KEWASPADAAN DAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	: NELVIA ZULNI, S.TP

KEPALA UPTD RUMAH POTONG HEWAN

: Ir.RINALDI

KTU UPTD RUMAH POTONG HEWAN

: ZURNAWATI

KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

: drh. INDRA

KTU UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

: NOFEBRIANTO, S.Sos

KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN

: SYAMSUMIR, S.Si

KTU UPTD BALAI BENIH IKAN

: NURLIANI

E. Sumber Daya Manusia

2.2.1. Kepegawaian

Kondisi jumlah pegawai Dinas Pertanian Kota Padang panjang pada Tahun 2018 adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

No	Penempatan	Gol Ruang PNS				Pendidikan							Jml PNS	THL
		I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D III	D IV	S1	S2		
1	Dinas Pangan dan Pertanian	-	7	26	7	1	-	17	1	-	37	3	40	27
2	UPTD BBI	-	-	3	-	-	-	9	-	-	3	-	3	11
3	UPTD Puskesmas	1	3	1	1	1	2	8	-	-	5	-	6	12
4	UPTD RPH	-	1	2	-	1	1	6	-	-	2	-	3	10
	Jumlah	1	11	32	8	3	3	40	1	-	47	3	52	60

Kelembagaan Tani

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian, juga sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok organisasi petani sebagai pelaku usaha pertanian dengan data sebagai berikut :

No	Organisasi Petani	Jumlah
1	Kelompok Tani	123
2	Gabungan Kelompok Tani	16

F. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja kelembagaan Pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagai pelaksana sebagian Urusan Pilihan di bidang Pangan, Pertanian serta Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2018.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang Panjang khususnya Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang guna melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LKj IP dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Urusan Pilihan pada Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun berikutnya.
3. Untuk menyajikan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya tujuan LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyampaikan informasi dan laporan mengenai kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang selama Tahun 2018 sebagai konsekuensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Walikota Padang Panjang.
2. Sebagai bahan masukan dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan guna melakukan penyempurnaan format dan muatannya di masa datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun Anggaran 2018 ini merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki dua fungsi utama yaitu :

2. Merupakan sarana bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP Dinas Pangan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018 mencakup aspek sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj IP Tahun 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2018.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj IP Tahun 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kota Padang Panjang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

G. Sistematika Penyusunan

LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi
- C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran

E. Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, maka telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2013 – 2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul.

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta capaiannya akan diuraikan pada bab ini.

A. Visi Dinas Pangan dan Pertanian

Visi pembangunan jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun mendatang. Dengan kata lain, visi pembangunan jangka menengah adalah merupakan aspirasi dan cita-cita Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang diinginkan di masa yang akan datang. Adapun visi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah :

”Terwujudnya masyarakat tani yang amanah, aman dan sejahtera serta ketahanan pangan yang tangguh melalui agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan ”

Adapun pengertian dari VISI ini adalah :

Masyarakat tani	Adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan)
Agribisnis	Adalah <u>bisnis</u> berbasis usaha <u>pertanian</u> atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir
Agroindustri	Adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut
Berwawasan lingkungan	Budidaya pertanian yang menerapkan kaidah pelestarian lingkungan

Amanah	: Adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir
Aman	: Adalah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri
Sejahtera	: Adalah kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai
Ketahanan Pangan	: Adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

B. Misi Dinas Pangan dan Pertanian

Secara umum misi dapat dipandang sebagai upaya atau langkah-langkah untuk mewujudkan VISI. Dengan demikian MISI Dinas Pangan dan Pertanian adalah sesuatu yang diamban atau dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sesuai dengan yang telah ditetapkan, agar TUJUAN dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Adapun misi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM petugas dan petani;
2. Mengembangkan komoditi unggulan daerah;
3. Mengembangkan teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian;
4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan tani;
5. Meningkatkan kesadaran petani dan masyarakat terhadap pangan beragam, bergizi, eimbang dan aman; dan
6. Meningkatkan pelayanan ke masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

C. Tujuan Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah menetapkan tujuan strategis sesuai dengan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi yang dijabarkan lagi menjadi sasaran strategis.

Dalam rangka mencapai VISI dan MISI yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa rangkaian penetapan TUJUAN organisasi.

Penetapan TUJUAN dan SASARAN Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada umumnya didasarkan pada *faktor-faktor kunci keberhasilan* yang dilakukan setelah penetapan VISI dan MISI. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mampu mencapai Tujuan dan Sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Dengan demikian Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan VISI dan MISI, yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan visi dan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang menetapkan **TUJUAN** sebagai berikut :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Terwujudnya kesejahteraan petani melalui peningkatan pertanian yang berwawasan lingkungan;
3. Terwujudnya nilai tambah pendapatan terhadap komoditi pertanian melalui pengembangan teknologi tepat guna;
4. Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan tani;
5. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan keamanan pangan; dan
6. Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

D. Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yang dalam konteks ini dimaksudkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang ingin dicapai dalam satu tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang difokuskan pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

Berdasarkan proyeksi atau target yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, maka untuk mencapai tujuannya ditetapkan **SASARAN** sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana berikut ini :

- Tujuan 1 : **Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan keamanan pangan**
Sasaran 1 : Meningkatkan konsumsi pangan Beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
- Tujuan 2 : **Terwujudnya kesejahteraan petani melalui peningkatan pertanian yang berwawasan lingkungan**
Sasaran 2 : Meningkatkan produksi perikanan
- Tujuan 3 : **Terwujudnya kesejahteraan petani melalui peningkatan pertanian yang berwawasan lingkungan**
Sasaran 3 : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian/ Perkebunan
- Tujuan 4 : **Terwujudnya nilai tambah pendapatan terhadap komoditi pertanian melalui pengembangan teknologi tepat guna**
Sasaran 4 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

E Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018

Sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang melaksanakan sebagian urusan pilihan yang mencakup : 1) Bidang Pangan, 2) Bidang Pertanian, serta 3) Bidang Kelautan dan Perikanan, maka telah ditetapkan **8 (Delapan) program** yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada tahun anggaran 2018 sesuai dengan Penetapan Kinerja TA.2018, dimana program yang ditetapkan ini disinergikan dengan program kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dan dijabarkan dalam **23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan**, yaitu :

Tabel 1 . Penetapan Kinerja Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,00	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		
				Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	108.600.000	
				Pengembangan Diversifikasi Tanaman	114.415.000	
				Analisis dan Penyuluhan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	18.450.000	
				Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok	7.450.000	
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	84.897.500	
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan	* Persentase Produksi Benih Perikanan (%)	52,50	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		
		* Persentase Produksi Konsumsi Ikan	81,30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	790.068.000	
				Peningkatan dan Pengembangan Perikanan	353.980.000	
				Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	72.700.000	
3.	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian/ Perkebunan	* Persentase Produktivitas sektor pertanian (%)	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		
				Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	26.705.000	
				DAK Bidang Pertanian	559.359.000	
				Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/ Perkebunan	168.598.000	
				Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	65.175.000	
				Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	99.185.000	
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan		
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	84.897.500	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
		* Persentase Populasi Sapi perah	5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	84.897.500
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	
				Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	272.804.000
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
				Pembibitan dan Perawatan Ternak	1.071.715.000
4	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian	5,67%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	84.897.500
				Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	108.600.000
				Pengembangan Diversifikasi Tanaman	114.415.000
				Analisis dan Penyuluhan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	18.450.000
				Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok	7.450.000
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	790.068.000
				Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	72.700.000

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Peningkatan dan Pengembangan Perikanan	353.980.000
				Peningkatan Kesejahteraan Petani	
				Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	144.323.000
				Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	66.676.000
				Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	
				Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	26.705.000
				DAK Bidang Pertanian	559.359.000
				Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/ Perkebunan	168.598.000
				Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	
				Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	65.175.000
				Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	99.185.000
				Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tenaga Penyuluh Pertanian/Pekebunan	31.475.000
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	
				Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	272.804.000
				Pembibitan dan Perawatan Ternak	1.071.715.000
				Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	290.644.000
				Pengembangan Agribisnis Peternakan	48.900.000
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan	751.027.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tahun 2018 ini, penilaian pencapaian kinerja telah dilakukan sampai pada tingkat indikator kinerja outcome.

Dari 12 program yang telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2018 terdapat 8 program yang menyangkut langsung dengan Tupoksi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja TA. 2018 yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Secara umum Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Sebanyak 8 program dengan 23 kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2018 untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Realisasi dari indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat dijabarkan seperti berikut :

Sasaran 1: Meningkatkan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	% capaian 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,1	85	85	100

Cara Pengukuran Indikator Sasaran:

Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Rumus penyediaan pangan adalah :
 $Ps = Pr - St + Im - Ek$

Dimana : Ps : Total Penyediaan dalam negeri

Pr : Produksi

St : Stok akhir –

Stok awal Im : Impor Ek : Ekspor

Pencapaian skor PPH Kota Padang Panjang pada tahun 2018 sebesar 85 dengan persentasi capaian sebesar 100. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan skor pada tahun 2017 yaitu sebesar 84,1. Namun demikian skor PPH kota Padang Panjang tahun 2018 masih berada dibawah capaian propinsi Sumatera Barat (86,3) dan Target Nasional (88,4).

Berdasarkan analisa terhadap skor PPH Kota Padang Panjang sebesar 85 menunjukkan bahwa masyarakat telah menerapkan pola **Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)**, meskipun belum pada kondisi maksimal yang tercermin dengan skor PPH 100. Saat ini konsumsi pangan padi-padian, minyak dan lemak telah melebihi konsumsi ideal yang terlihat dari skor AKE yang melebihi skor maksimum. Sementara konsumsi terhadap pangan umbi – umbian, pangan hewani dan gula masih dibawah yang dianjurkan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman** dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan 5 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dala APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 333.812.500,- .

Adapun 5 kegiatan tersebut antara lain :

1. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
2. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
3. Pengembangan diversifikasi tanaman
4. Analisis dan Penyuluhan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
5. Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Sudah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
2. Masyarakat Kota Padang Panjang sudah banyak memanfaatkan pekarangan dengan menanam beragam buah dan sayur untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga.
3. Tingginya kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan
4. Sosialisasi dan pelatihan menu Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) serta pengolahan pangan lokal oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

Sasaran 2: Meningkatkan Produksi Perikanan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	% capaian 2017	Tahun 2018		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase Produksi Benih Perikanan	73,92	52,50	52,54	100,08
2.	Persentase Produksi Ikan Konsumsi	96,08	81,30	81,33	100,04

Cara Pengukuran Indikator Sasaran Persentase Produksi Benih Perikanan:
Jumlah produksi benih ikan (Ekor) bagi Target Daerah (Ekor) kali 100 persen

Cara Pengukuran Indikator Sasaran Persentase Produksi Ikan Konsumsi:
Jumlah Konsumsi Ikan (Ton) bagi Target Daerah (Ton) kali 100 persen

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persentase Produksi Benih Perikanan

Pencapaian Persentase Produksi Benih Perikanan di Kota Padang panjang pada Tahun 2018 sebesar 100,08%. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan persentase capaian tahun 2017 yaitu sebesar 73,92%. Jumlah Produksi benih perikanan pada tahun 2018 mencapai 683.000 ekor lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 961.000 ekor sedangkan target daerah 1.300.000 ekor lebih rendah dibanding target provinsi 1.565.662.019.

2. Persentase Produksi Ikan Konsumsi

Pencapaian Persentase Produksi Konsumsi Ikan di Kota Padang panjang pada Tahun 2018 sebesar 100,04%. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan persentase capaian tahun 2017 yaitu sebesar 96,08%. Jumlah Produksi konsumsi ikan pada tahun 2018 mencapai 610 ton lebih

rendah dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 720,64 ton dengan target daerah sebesar 750 ton lebih rendah dari target provinsi 266.991,29 Ton.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya produksi perikanan** dilaksanakan program Pengembangan Budidaya Perikanan dan 3 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.216.748.000,-, 3 kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)
2. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Perikanan
3. Pengolahan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Sektor perikanan mengalami peningkatan dimana masyarakat Kota Padang Panjang sudah banyak mengkonsumsi ikan dan produksi benih ikan terus bertambah.

Sasaran 3: Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian/ Perkebunan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian/ Perkebunan:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Produktivitas Sektor Pertanian	1	-28,78*	-2.878
2.	Persentase Populasi Sapi perah	5	-15,87	-317,40

Ket: * Angka Sementara produktivitas padi dari Badan Pusat StatiCatatan

Cara Pengukuran Indikator Sasaran Persentase Produktivitas Sektor Pertanian:

Selisih produktivitas tahun lalu dengan tahun berjalan dibagi dengan produktivitas tahun lalu kali 100 persen

Cara Pengukuran Indikator Sasaran Persentase Populasi Sapi Perah:

Selisih dari populasi tahun ini dengan tahun yang lalu dibagi populasi tahun lalu dikali 100 persen

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persentase Produktivitas Sektor Pertanian

Capaian Persentase Produktivitas Sektor Pertanian pada Tahun 2018 sebesar -28,78% dengan persentase capaian sebesar -2.878%. Produktivitas padi tahun 2018 sebesar 4,5 ton/ha angka

sementara data dari Badan Pusat Statistik, produktivitasnya lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 6,4 ton/ ha. Target Indikator Kinerja Persentase Produktivitas Sektor Pertanian tahun 2018 ditargetkan naik 1% dari produktivitas padi tahun lalu.

2. Persentase Populasi Sapi Perah

Capaian Persentase populasi sapi perah pada Tahun 2018 sebesar -15,87% dengan persentase capaian sebesar -317,40%. Populasi sapi pada tahun 2018 sebanyak 334 ekor lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 281 ekor.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian/ Perkebunan dilaksanakan melalui 8 program dan 13 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 5.147.146.500,-

8 program tersebut sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Budidaya Perikanan
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Hambatan/ masalah:

1. Menurunnya Produksi dan Produktivitas komoditi tanaman pangan (padi) karena : Adanya perbaikan jaringan irigasi Kubang Laweh yang sempit membuat jadwal tanam tertunda selama delapan bulan (Januari- Agustus) di Kelurahan Ekor Lubuk Kelompok Tani Simbaru Seluas 1 Ha.
2. Adanya serangan hama tikus seluas 79,5 Ha, hama kresek 1,9 Ha dan Blast 6 Ha sepanjang tahun.
3. Adanya Alih Fungsi lahan persawahan menjadi perkantoran, perumahan, tempat ibadah dan sebagainya
4. Berkurangnya populasi sapi perah dikarenakan beberapa peternak melakukan penjualan sapi.

5. Daya serap pasar yang terbatas terhadap produk susu sehingga menimbulkan kurangnya animo peternak sapi perah untuk menambah atau meningkatkan populasi temaknya.
6. Masih tinggi biaya operasional produksi Sapi Perah (Pakan dan lain-lain).

Strategi pemecahan masalah

1. Perbaiki jaringan irigasi Kubang Laweh
2. Adanya himbuan kegiatan Gerakan Berburu Tikus di Kota Padang Panjang, serta adanya bantuan sarana penangkapan hama tikus seperti : racun tikus dan sebagainya
3. Perlunya penyusunan perda penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Padang Panjang
4. Meningkatkan daya serap penjualan susu murni/ penambahan pasar susu.
5. Melakukan inseminasi buatan menggunakan semen beku sexing untuk meningkatkan kelahiran anak sapi perah betina.
6. Perlunya central pakan penyediaan bahan baku pakan untuk ternak sapi perah sehingga bias menekan biaya operasional.

Sasaran 4: Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017	% capaian 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian	5,41	5,67	5,41	95,41

Cara Pengukuran Indikator Sasaran:

Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian/ Perkebunan dibagi Jumlah PDRB kali 100 persen

Pencapaian persentase kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian di Kota Padang Panjang pada tahun 2018 sebesar 5,41% dengan persentasi capaian sebesar 95,41%. Nilai ini rendah dibandingkan persentase pada tahun 2017 yaitu sebesar 100% dikarenakan produktivitas sector pertanian yang rendah.

Indikator kinerja ini didukung oleh 8 program dan 13 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 5.147.146.500,-

8 program tersebut sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Budidaya Perikanan
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada tiap-tiap sasaran perlu dilakukan analisis guna mendapatkan bahan dalam pengalokasian dana pada tahun berikutnya. Anggaran yang dilakukan analisis sebatas anggaran belanja langsung OPD, sedangkan belanja tidak langsung belum dapat dilakukan analisis. Anggaran dan realisasi pada tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel . Analisa Capaian Keuangan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket	
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	85	skor	100,00	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					
							Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	108.600.000	89.220.795	82,16		
							Pengembangan Diversifikasi Tanaman	114.415.000	109.919.800	96,07		
							Analisis dan Penyuluhan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	18.450.000	12.758.000	69,15		
							Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok	7.450.000	5.949.050	79,85		
							Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	84.897.500	82.060.000	96,66		
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan	* Persentase Produksi Benih Perikanan (%) * Persentase Produksi Konsumsi Ikan	52,50	52,54	%	100,08	Program Pengembangan Budidaya Perikanan					
			81,30	81,33	%	100,04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	790.068.000	186.587.000	23,62		
							Peningkatan dan Pengembangan Perikanan	353.980.000	283.850.000	80,19		
							Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	72.700.000	62.038.000	85,33		
3.	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian/ Perkebunan	* Persentase Produktivitas sektor pertanian (%)	1	-28,78	%	-	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan					
							2878,0	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	26.705.000	20.390.750	76,36	
				0				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan				
							Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	65.175.000	61.557.250	94,45		

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan				
							Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	65.175.000	61.557.250	94,45	
							Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	99.185.000	94.783.000	95,56	
							Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
							Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	84.897.500	82.060.000	96,66	
		* Persentase Populasi Sapi perah	5	-15,87	%	-317,40	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan				
							Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	272.804.000	235.790.850	86,43	
							Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				
							Pembibitan dan Perawatan Ternak	1.071.715.000	991.118.157	92,48	
							Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	290.644.000	280.938.500	96,66	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian	5,67%	5,41%	%	95,41	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
							Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	84.897.500	82.060.000	96,66	
							Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	108.600.000	89.220.795	82,16	
							Pengembangan Diversifikasi Tanaman	114.415.000	109.919.800	96,07	
							Analisis dan Penyuluhan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	18.450.000	12.758.000	69,15	
							Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok	7.450.000	5.949.050	79,85	
							Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	790.068.000	186.587.000	23,62	
							Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	72.700.000	62.038.000	85,33	
							Peningkatan dan Pengembangan Perikanan	353.980.000	283.850.000	80,19	
							Peningkatan Kesejahteraan Petani				
							Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	144.323.000	98.010.150	67,91	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	66.676.000	39.236.500	58,85	
							Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan				
							Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	26.705.000	20.390.750	76,36	
							DAK Bidang Pertanian	559.359.000	550.959.100	98,50	
							Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/ Perkebunan	168.598.000	157.235.500	93,26	
							Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan				
							Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	65.175.000	61.557.250	94,45	
							Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	99.185.000	94.783.000	95,56	
							Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan				
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tenaga Penyuluh Pertanian/Pekebunan	31.475.000	28.822.900	91,57	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan				
							Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	272.804.000	235.790.850	86,43	
							Pembibitan dan Perawatan Ternak	1.071.715.000	991.118.157	92,48	
							Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	290.644.000	280.938.500	96,66	
							Pengembangan Agribisnis Peternakan	48.900.000	27.846.750	56,95	
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan	751.027.000	678.504.000	90,34	

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisa terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyampaian LKj IP Dinas Pertanian Kota Padang Panjang merupakan salah satu pemenuhan kewajiban Laporan Pemerintah Daerah sekaligus dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyusunan LKj IP ini masih mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, khususnya terhadap kinerja tahun 2018.
3. Dalam LKj IP Dinas Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini telah dianalisis sebanyak 4 sasaran. Secara umum capaian kinerja tahun 2018 telah dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai indikator tingkat capaian kinerja output dan outcome.

B. SARAN/ REKOMENDASI

Berdasarkan gambaran kinerja yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk tahun 2018, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan dukungan dari pihak legislatif dan instansi terkait agar Program Pembangunan Pertanian yang ditargetkan dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Padang Panjang dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah guna tercapainya visi dan misi.
2. Penyusunan program dan kegiatan agar merujuk pada sasaran visi dan misi yang telah ditetapkan guna pencapaian indikator kinerja yang lebih baik.
3. Diperlukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan setiap kegiatan.